

Membaca Sejarah dalam Membangun Negara: Perspektif Historis dalam Reformasi Administrasi Publik

Arditya Prayogi

UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

arditya.prayogi@uingusdur.ac.id

Riki Nasrullah

Universitas Negeri Surabaya

rikinasrullah@unesa.ac.id

Singgih Setiawan

UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

singgih.setiawan@uingusdur.ac.id

M. Adin Setyawan

UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

m.adin.setyawan@uingusdur.ac.id

Abstrak

Artikel ini menegaskan urgensi perspektif historis dalam reformasi administrasi publik, khususnya dalam memperbaiki tata kelola, memperkuat legitimasi kebijakan, dan mencegah pengulangan kesalahan administratif di masa lalu. Selain itu, kajian ini menyoroti bagaimana sejarah dapat menjadi sumber inspirasi dalam reformasi birokrasi serta alat dalam menyelesaikan konflik sosial yang muncul akibat kebijakan administratif. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan terkait administrasi negara di Indonesia. Hasil telaah mengidentifikasi pola historis seperti kegagalan koordinasi birokrasi dan lemahnya mekanisme akuntabilitas yang secara konsisten memengaruhi efektivitas reformasi administrasi publik, sekaligus menawarkan interpretasi baru mengenai peran sejarah dalam merumuskan strategi perbaikan tata kelola. Dengan memahami sejarah, pembuat kebijakan dapat menciptakan sistem administrasi yang lebih responsif, transparan, dan demokratis. Oleh karena itu, integrasi antara sejarah dan administrasi negara harus menjadi bagian penting dalam setiap upaya reformasi pemerintahan, guna memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan publik yang diimplementasikan.

Kata Kunci: sejarah; kebijakan publik; tata kelola pemerintahan; reformasi birokrasi; legitimasi pemerintahan

1. PENDAHULUAN

Administrasi negara merupakan salah satu elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang terus mengalami perkembangan seiring perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Sistem administrasi yang diterapkan dalam suatu negara tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari perjalanan sejarah panjang yang membentuk

pola kebijakan, tata kelola, serta budaya birokrasi suatu bangsa. Oleh karena itu, kajian terhadap sejarah administrasi negara menjadi aspek penting dalam memahami bagaimana suatu sistem pemerintahan berkembang dan menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan zaman (Muliati, 2019).

Meskipun administrasi negara di Indonesia terus mengalami perubahan dari era

kolonial hingga pasca kemerdekaan, reformasi administrasi publik masih menghadapi persoalan mendasar seperti fragmentasi birokrasi, lemahnya akuntabilitas, dan ketidaksesuaian antara desain kelembagaan dan kebutuhan tata kelola modern. Ketidaktuntasan reformasi ini menunjukkan adanya gap antara prinsip administrasi publik ideal dan praktik yang berjalan. Kondisi ini menegaskan urgensi untuk menelaah kembali pola historis yang membentuk struktur birokrasi Indonesia guna memahami akar persoalan dan merumuskan arah reformasi yang lebih efektif (Hasan, 2012).

Sejarah kajian ini memfokuskan analisis pada perkembangan administrasi negara Indonesia mulai dari masa kolonial hingga era reformasi, dengan menyoroti pola historis yang memengaruhi desain kelembagaan dan efektivitas kebijakan publik. Sejarah administrasi dipahami sebagai rujukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan tata kelola sebagaimana diungkapkan Riyadi (2018) serta sebagai dasar pembentukan legitimasi pemerintahan (Djamin, 2001). Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif historis kelembagaan untuk menjelaskan bagaimana pergeseran paradigma administrasi publik menuju prinsip good governance sebagaimana dicatat Muqoyyidin (2021) merefleksikan respons terhadap tantangan struktural yang terus berulang. Dengan batasan ini, kajian diarahkan untuk mengidentifikasi pola historis

yang relevan bagi kebutuhan reformasi administrasi publik Indonesia saat ini.

Kajian mengenai sejarah administrasi negara semakin penting mengingat banyak penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis dan prosedural, seperti efisiensi birokrasi, reformasi kelembagaan, atau implementasi good governance, tanpa mengulas bagaimana pola-pola historis membentuk dinamika tersebut. Sejumlah studi administrasi publik di Indonesia, misalnya, hanya membahas reformasi birokrasi pasca-Orde Baru secara kontemporer tanpa menelusuri akar historis dari sentralisasi kekuasaan, kultur patrimonial, atau fragmentasi kelembagaan yang sudah terbentuk sejak masa kolonial. Kekosongan ini menunjukkan adanya research gap dalam memahami keterkaitan antara perkembangan sejarah administrasi dan kegagalan reformasi yang berulang. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis historis yang menelusuri kontinuitas dan perubahan dalam struktur administrasi negara Indonesia, serta menjelaskan bagaimana pola-pola historis tersebut memengaruhi keberhasilan atau kegagalan agenda reformasi administrasi publik saat ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa kerangka interpretatif historis yang dapat digunakan untuk merumuskan arah reformasi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan (Nur, 2022).

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran sejarah dalam administrasi negara serta menganalisis bagaimana pemanfaatannya dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Melalui kajian ini, diharapkan para pembuat kebijakan dapat memahami, bahwa perspektif historis bukan hanya sebagai bagian dari ilmu sejarah, tetapi juga sebagai elemen penting dalam membangun kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artikel ini diharapkan dapat memberi kontribusi berupa wawasan komprehensif mengenai bagaimana sejarah dapat digunakan sebagai alat dalam membangun sistem administrasi yang lebih baik. Dengan mengedepankan pendekatan historis dalam administrasi negara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi pemerintahan, serta pembuat kebijakan dalam menyusun strategi reformasi administrasi yang lebih efektif dan berkelanjutan (Purnaweni, 2004).

II. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan historis dengan metode historiografi, mengkaji sumber primer dan sekunder secara sistematis melalui kritik sumber, penelusuran kronologi, serta interpretasi historis. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan historis-deskriptif dan historis-analitis untuk mengidentifikasi pola perkembangan administrasi negara dan

relevansinya bagi reformasi administrasi publik. Kalimat ini menegaskan fokus historis, menyebut teknik analisis sejarah, dan menjelaskan perlakuan metodologis terhadap sumber sejarah. Studi kepustakaan dipilih karena memberikan pemahaman mendalam mengenai teori, konsep, dan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sejarah administrasi negara dan implementasinya dalam kebijakan publik. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen kebijakan yang terbit antara periode kolonial hingga era reformasi. Pemilihan sumber dilakukan melalui kriteria inklusi-eksklusi yang mempertimbangkan relevansi tematik, kredibilitas akademik, dan konteks geografis Indonesia, sehingga hanya literatur yang memiliki kekuatan historis dan analitis yang digunakan dalam kajian ini. Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis yang dipadukan dengan langkah sistematis ala Miles dan Huberman, yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Santika et al, 2019). Data historis dikodekan berdasarkan kategori tematik, seperti pola kelembagaan, praktik birokrasi, dan dinamika kebijakan—untuk mengoperasionalkan konsep “sejarah” dan “administrasi negara.” Setiap kategori kemudian diklasifikasikan secara kronologis dan dibandingkan antar periode guna mengidentifikasi kontinuitas, perubahan, serta relevansinya bagi reformasi administrasi

publik. Reduksi data dilakukan dengan memilih sumber yang memiliki relevansi tinggi dengan topik penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif yang menghubungkan konsep sejarah dengan administrasi negara. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengevaluasi berbagai temuan dan merumuskan implikasi akademik maupun praktis dari hasil kajian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Sejarah dalam Pengadministrasian Negara

Dalam menganalisis peran sejarah terhadap perkembangan administrasi negara, penelitian ini menggunakan sumber historis yang telah diseleksi melalui kriteria inklusi-eksklusi yang ketat. Sumber primer dan sekunder yang digunakan mencakup periode kolonial hingga era reformasi, dengan fokus pada konteks Indonesia dan kredibilitas akademik tiap dokumen. Pendekatan ini memastikan bahwa interpretasi terhadap peristiwa masa lalu benar-benar didasarkan pada bukti historis yang valid dan relevan bagi pembahasan reformasi administrasi publik. Selain sebagai catatan peristiwa, sejarah berfungsi sebagai refleksi perjalanan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun sosial (Muliati, 2019). Dalam konteks administrasi negara, sejarah berperan tidak hanya sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai sumber utama dalam memahami

identitas bangsa, menyusun kebijakan, serta memperkuat legitimasi pemerintah. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap sejarah menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan bijaksana.

Identitas nasional suatu negara dibentuk oleh pengalaman kolektif masyarakat yang mencakup perjuangan, konflik, serta pencapaian di berbagai bidang. Di Indonesia, misalnya, sejarah perjuangan kemerdekaan tidak hanya menciptakan peristiwa bersejarah, tetapi juga membentuk karakter bangsa. Pemahaman sejarah yang baik menjadi kunci bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik agar tetap sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat (Sujatmiko, 2014). Pemerintah yang memiliki apresiasi terhadap sejarah lebih mampu menghasilkan kebijakan yang relevan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Analisis menunjukkan, bahwa sentralisasi birokrasi pada masa kolonial dan kurangnya mekanisme akuntabilitas selama Orde Baru menjadi penyebab kegagalan kebijakan administrasi, sementara reformasi pasca-1998 berhasil meningkatkan partisipasi dan transparansi birokrasi. Studi historis ini menegaskan, bahwa mempelajari pola keberhasilan dan kesalahan masa lalu membantu merancang strategi reformasi administrasi publik yang lebih efektif. Analisis terhadap pengalaman masa lalu dapat membantu pemerintah menghindari kesalahan

yang sama. Pemahaman terhadap penyebab krisis dan konflik, misalnya, berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih matang dan berkelanjutan. Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, yang mengintegrasikan pelajaran sejarah administrasi publik dari periode pasca-Perang Dunia II, menunjukkan kesiapan lebih baik dalam menghadapi reformasi birokrasi, terlihat dari penerapan sistem merit dan modernisasi prosedur administrasi yang berkelanjutan (Hariyono, 2019).

Inspirasi dari sejarah juga terlihat dalam berbagai inovasi administrasi publik. Banyak negara mengadopsi strategi administrasi yang terbukti efektif di tempat lain dengan menyesuaikannya dengan kondisi lokal masing-masing. Sejarah memberikan konteks yang jelas dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik, memperkuat demokrasi, serta mencapai stabilitas ekonomi dan politik (Sujatmiko, 2014).

Dalam konteks reformasi administrasi publik, pemahaman sejarah memungkinkan pemerintah merancang kebijakan yang lebih legimitif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan. Berbagai kebijakan yang menghargai jasa pahlawan nasional serta memperingati momen penting sejarah menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas nasional. Sebaliknya, penyalahgunaan sejarah untuk kepentingan politik dapat mengakibatkan ketidakpercayaan

masyarakat dan memicu ketidakstabilan sosial (Muliati, 2019).

Konflik sosial akibat kebijakan administratif yang kontroversial dapat diminimalkan dengan pendekatan berbasis sejarah. Pemahaman terhadap latar belakang historis suatu konflik memungkinkan pemerintah merancang strategi penyelesaian yang lebih efektif. Sejumlah negara telah menunjukkan, bahwa rekonsiliasi nasional sering kali memerlukan pengakuan terhadap peristiwa masa lalu yang menyakitkan. Dialog berbasis sejarah menjadi jembatan bagi kelompok-kelompok yang bertikai, sehingga menciptakan ruang untuk perdamaian dan pemulihian sosial (Hariyono, 2019).

Pendidikan sejarah memiliki peran penting dalam membangun kesadaran generasi muda mengenai identitas nasional. Kisah perjuangan tokoh sejarah dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran sejarah juga semakin memperkuat pemahaman dan kesadaran kolektif mengenai pentingnya sejarah dalam administrasi negara.

Sejarah bukan hanya sekadar catatan peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi landasan dalam menyusun kebijakan publik yang lebih baik. Dengan pemahaman sejarah yang kuat, pemerintah dapat menghindari kesalahan yang sama, membangun legitimasi

publik, menyelesaikan konflik, serta menginspirasi generasi mendatang. Oleh karena itu, sejarah harus menjadi bagian integral dalam setiap proses pengambilan keputusan dan reformasi administrasi negara (Abdullah, 1985).

Kajian mengenai sejarah sering kali dianggap normatif, tetapi dalam praktiknya, sejarah memiliki peran konkret sebagai sumber inspirasi bagi generasi saat ini. Kisah perjuangan serta keberhasilan para tokoh sejarah memberikan motivasi bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Pendidikan sejarah di berbagai institusi pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk karakter dan semangat kebangsaan generasi muda. Ketika pelajar memahami perjuangan para pahlawan nasional, mereka lebih terdorong untuk aktif dalam kehidupan sosial dan politik (Hastuti, Zafri, & Basri, 2019). Bung Karno dan Bung Hatta, sebagai contoh menunjukkan, bahwa individu memiliki potensi besar dalam menciptakan perubahan yang signifikan bagi masyarakat dan negara.

Perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah cara generasi muda memahami sejarah. Media sosial kini menjadi salah satu alat utama dalam mempromosikan kesadaran sejarah. Akses informasi yang lebih mudah dan cepat memungkinkan diskusi serta berbagi wawasan mengenai sejarah dalam konteks kehidupan modern (Wirawan, 2016).

Media sosial juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk menginterpretasikan ulang sejarah sesuai dengan dinamika sosial saat ini, sehingga identitas nasional semakin kuat dan kesadaran kolektif tentang pentingnya menghargai sejarah semakin berkembang (Hariyono, 2019).

Sejarah bukan sekadar rekaman peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi alat penting dalam administrasi negara. Pemahaman yang mendalam mengenai sejarah memungkinkan para perumus kebijakan untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif, memperkuat legitimasi pemerintah, menyelesaikan konflik sosial, serta menginspirasi generasi mendatang (Muchit, 2007). Sejarah harus menjadi bagian integral dalam setiap proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik. Dengan memahami pelajaran dari masa lalu, sebuah negara dapat menghindari kesalahan yang sama dan menciptakan masa depan yang lebih stabil serta berkelanjutan (Prodjo, 2020).

2. Sejarah sebagai Dasar Reformasi Administrasi Negara

Reformasi administrasi negara merupakan suatu keharusan bagi setiap pemerintahan yang ingin tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Dalam proses reformasi ini, sejarah memiliki peran sentral sebagai sumber pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Pemahaman yang mendalam terhadap sejarah

administrasi negara memungkinkan pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi pola keberhasilan dan kegagalan, sehingga reformasi yang dijalankan dapat lebih efektif dan berkelanjutan (Dwiyanto, 2011).

Sejarah administrasi negara mencatat berbagai transformasi yang telah terjadi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Misalnya, reformasi birokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru merupakan contoh bagaimana pengalaman sejarah digunakan untuk merancang administrasi yang lebih transparan dan akuntabel (Effendi, 2018). Pada era ini, berbagai kebijakan dibuat untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

Salah satu pelajaran penting dari sejarah administrasi negara adalah bagaimana kebijakan yang tidak berbasis pada realitas sosial dapat menimbulkan resistensi. Reformasi birokrasi yang berhasil di berbagai negara menunjukkan, bahwa kebijakan yang mempertimbangkan konteks sejarah sosial-politik seperti pola hubungan elit-birokrasi dan pengalaman reformasi sebelumnya lebih mudah diterima masyarakat (Thoha, 2008). Oleh karena itu, sejarah menjadi alat penting dalam memastikan reformasi yang berakar pada kondisi nyata.

Pentingnya sejarah dalam reformasi administrasi negara juga tercermin dalam model *governance* yang diterapkan di berbagai negara. Indonesia, misalnya, mengadopsi

sistem desentralisasi sebagai upaya meningkatkan efektivitas administrasi berdasarkan pengalaman sejarahnya sendiri (Mardiasmo, 2018).

Dalam konteks Indonesia, sejarah administrasi negara juga menunjukkan, bahwa reformasi tidak dapat dilakukan secara instan. Proses panjang yang terjadi sejak era kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi mencerminkan, bahwa setiap perubahan administratif harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi historis yang melatarbelakanginya (Nasution, 2016). Pengalaman kegagalan reformasi birokrasi pada masa Orde Baru, seperti upaya sentralisasi yang menimbulkan resistensi birokrasi, menjadi rujukan penting untuk merancang strategi reformasi yang lebih efektif di era Reformasi (Santika, 2021).

Salah satu aspek sejarah yang relevan dalam reformasi administrasi adalah sistem birokrasi yang diwarisi dari masa kolonial. Dalam banyak kasus, sistem birokrasi yang terlalu hierarkis dan kaku menjadi hambatan bagi efisiensi pelayanan publik. Oleh karena itu, banyak negara yang melakukan deregulasi birokrasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas administrasi pemerintahan (Santoso, 2019).

Pemanfaatan sejarah dalam reformasi administrasi negara juga dapat dilihat dalam konteks desentralisasi (Kandia, 2023). Sejarah menunjukkan, bahwa desentralisasi yang

berhasil biasanya didukung oleh kesiapan kapasitas institusional di tingkat lokal. Tanpa kesiapan tersebut, desentralisasi justru dapat menimbulkan permasalahan baru, seperti ketimpangan pembangunan dan lemahnya koordinasi antar-wilayah (Tjiptoherijanto, 2015). Sejarah juga memberikan wawasan mengenai pentingnya meritokrasi dalam sistem administrasi. Banyak kegagalan administrasi negara di masa lalu disebabkan oleh sistem patronase yang lebih mengutamakan hubungan politik daripada kompetensi. Reformasi birokrasi di berbagai negara menunjukkan, bahwa penerapan sistem berbasis merit dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan (Sujamto, 2000).

Selain itu, pengalaman sejarah juga mengajarkan, bahwa reformasi administrasi harus bersifat adaptif terhadap perubahan zaman. Misalnya, digitalisasi administrasi negara yang saat ini berkembang pesat merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan publik yang lebih cepat dan transparan (Wahid, 2020). Negara-negara yang belajar dari pengalaman historisnya dalam mengelola administrasi cenderung lebih siap menghadapi tantangan di era digital. Dalam proses reformasi administrasi, penting untuk memahami, bahwa setiap negara memiliki konteks sejarah yang unik. Oleh karena itu, strategi reformasi yang berhasil di satu negara belum tentu dapat diterapkan secara langsung

di negara lain. Sejarah administrasi negara memberikan panduan dalam menyesuaikan kebijakan reformasi dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara (Prasojo, 2017).

Reformasi administrasi negara juga membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat berjalan secara efektif (Santika, 2020). Sejarah menunjukkan, bahwa reformasi yang bersifat *top-down* cenderung mengalami hambatan dalam implementasi. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dapat meningkatkan keberhasilan reformasi administrasi (Widodo, 2001). Keberhasilan reformasi administrasi juga dipengaruhi oleh stabilitas politik. Sejarah membuktikan, bahwa negara-negara yang mengalami gejolak politik cenderung sulit melakukan reformasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, stabilitas politik menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan reformasi administrasi negara (Syafrizal, 2013).

Di banyak negara, reformasi administrasi juga berkaitan erat dengan upaya pemberantasan korupsi. Sejarah mencatat, bahwa birokrasi yang bersih dan transparan merupakan hasil dari reformasi yang konsisten dan didukung oleh penegakan hukum yang kuat (Kartasasmita, 1996). Negara-negara yang berhasil mengurangi tingkat korupsi umumnya memiliki sejarah panjang dalam membangun sistem administrasi yang berbasis

pada akuntabilitas.

Aspek sejarah dalam reformasi administrasi juga mencakup peran pemimpin dalam mendorong perubahan. Sejarah menunjukkan, bahwa kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada reformasi memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan transformasi administrasi negara (Basuki, 2015). Pemimpin yang memiliki pemahaman sejarah yang kuat cenderung mampu mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengelola birokrasi. Pentingnya sejarah dalam reformasi administrasi negara juga terlihat dalam aspek pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri. Sejarah menunjukkan, bahwa negara yang memiliki sistem pelatihan administratif yang baik cenderung lebih sukses dalam menjalankan reformasi birokrasi (Harjono, 2011). Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan pegawai menjadi salah satu langkah strategis dalam reformasi administrasi.

Reformasi administrasi negara yang berorientasi pada sejarah juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Sejarah menunjukkan, bahwa reformasi yang bersifat jangka pendek cenderung kurang efektif dalam menciptakan perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, reformasi harus dirancang dengan visi jangka panjang agar dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat (Surbakti, 2010). Dengan demikian, sejarah memiliki peran yang sangat

penting dalam reformasi administrasi negara. Dengan memahami pengalaman masa lalu, para pembuat kebijakan dapat menghindari kesalahan yang sama dan merancang strategi reformasi yang lebih efektif. Reformasi administrasi yang berbasis sejarah memungkinkan pemerintah untuk membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan sejarah harus menjadi bagian integral dalam setiap upaya reformasi administrasi negara.

IV. SIMPULAN

Penelitian ini menemukan, bahwa pemahaman sejarah, seperti pengalaman reformasi birokrasi pada Orde Baru, memungkinkan pemerintah merancang kebijakan publik yang lebih legitimif dan diterima masyarakat, menunjukkan peran konkret sejarah dalam tata kelola pemerintahan. Analisis literatur menunjukkan bahwa pengalaman kegagalan reformasi birokrasi pada Orde Baru, seperti resistensi terhadap sentralisasi, menekankan pentingnya pemahaman sejarah agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan meningkatkan legitimasi di mata masyarakat. Selain itu, Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman sejarah membantu merancang reformasi birokrasi yang lebih transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan pengalaman kegagalan dan keberhasilan

reformasi sebelumnya. Dalam banyak kasus, negara-negara yang memahami sejarahnya dengan baik mampu menciptakan sistem administrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat dan tantangan global. Dengan mengkaji sejarah administrasi negara, para pembuat kebijakan dapat memperoleh pelajaran berharga dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Studi ini menegaskan bahwa pemanfaatan sejarah dalam administrasi negara harus menjadi bagian integral dalam setiap proses pengambilan keputusan dan reformasi kebijakan. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan historis dan praktik administrasi modern dapat menjadi solusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sejarah bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga pedoman dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi sistem administrasi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1985). Dimensi Sejarah Lokal dalam Administrasi Negara. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 1(1).
- Basuki, S. (2015). *Kepemimpinan dalam reformasi administrasi negara*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Djamin, A. (2001). Reformasi Aparatur Negara dalam Administrasi Publik Modern. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(1), 1-11.
- Dwiyanto, A. (2011). *Reformasi birokrasi di Indonesia: Dinamika dan tantangannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, M. (2018). *Birokrasi dan reformasi administrasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hariyono. (2019). Pendidikan Sejarah dalam Era Digital dan Revolusi Industri 4.0. *HISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 2(2), 63.
- Harjono, T. (2011). *Pendidikan dan pelatihan pegawai negeri dalam era reformasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasan, N. (2012). Corak Budaya Birokrasi pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga di Era Desentralisasi dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Unissula*, 28(2), 15-32.
- Hastuti, H., Zafri, Z., & Basri, I. (2019). Literasi Sejarah sebagai Upaya Penanaman Karakter bagi Anak. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 2(2), 105-120.
- Kandia, I. W. (2023). Sejarah Perjalanan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum Di Indonesia. *JOGER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 65-75.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Mardiasmo, D. (2018). *Desentralisasi dan tata kelola pemerintahan daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. (T. R. Rohidi, Trans.) Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Muchit, M. (2007). Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Sejarah. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 2(2), 105-120.
- Muliati. (2019). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia dalam Sistem Pemerintahan. *Meraja Journal*, 2(1), 83-92.
- Muqoyyidin, A. W. (2021). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi ke Depan.

- Jurnal Otonomi Daerah*, 5(3), 120-135.
- Nasrullah, R., Kisyani, K., Inayatillah, F., & Prayogi, A. (2025, February). Language and Climate Change: The Role of Language in Climate Change Communication and Mitigation in Indonesia. In *International Joint Conference on Arts and Humanities 2024 (IJCAH 2024)* (pp. 1129-1141). Atlantis Press.
- Nasution, A. (2016). *Sejarah administrasi negara di Indonesia: Dari kolonial hingga reformasi*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Nur, H. (2022). Paradigma Administrasi Negara: Perspektif Sejarah dan Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 45-60.
- Oktaviani, L., Prayogi, A., Pujiono, I. P., Riyadi, R., & Nasrullah, R. (2024). Upaya Guru PAI dalam Menanamkan Kesadaran Salat Zuhur Berjemaah di Sekolah. *Jurnal Man-anaa*, 1(1), 1-11.
- Prasodo, E. (2017). *Governance dan reformasi birokrasi di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., Setyawan, M. A., & Syaifuddin, M. (2025). Characteristics of Tutoring Students' Learning Styles: A Descriptive Study. *JELE: Journal of English Literature and Education*, 1(1), 8-14.
- Prayogi, A., Pujiono, I. P., Nasrullah, R., & Setiawan, S. (2025). Pelatihan Pengerjaan Soal-Soal TWK untuk Menghadapai SKD Sekolah Kedinasan bagi Siswa SMA Sederajat. *Journal of Community Research & Engagement*, 1(2), 345-253.
- Prayogi, A., Setyawan, M. A., Prabowo, D. S., & Aripin, U. (2024). Istimbath Method Of Islamic Law: A Descriptive Study. *AL MIDAD: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1(1), 1-13.
- Prayogi, A., Shilla, R. A., Pujiono, I. P., & Nasrullah, R. (2025). Upaya Penguatan Kualitas Pendidikan Melalui Sharing Session-Motivasi Studi Lanjut. *Journal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 17-25.
- Prodjo, P. (2020). Tantangan dan Peluang Pembelajaran Sejarah di Masa Pandemi. *Chronologia: Journal of History Education*, 2(1), 30-35.
- Pujiono, I. P., Prayogi, A., Shofiani, R., Yuliyanti, T., & Iskarim, M. (2024). Pemanfaatan Artificial Intelligence untuk Mendukung Tugas Guru di SMA Negeri 1 Bodeh. *Jurnal Parameter* Vol, 36(1), 77.
- Pujiono, I. P., Prayogi, A., & Rohmah, S. (2024). Pelatihan ChatGPT Sebagai Alat Bantu Belajar Mandiri Bagi Pelajar di Desa Kandangserang Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEK*, 4(2), 104-112.
- Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik Unpar*, 3(2), 77-93.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2).
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.
- Santoso, B. (2019). *Birokrasi dan efisiensi pelayanan publik: Kajian historis dan kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sujamto, S. (2000). *Meritokrasi dalam birokrasi Indonesia: Tinjauan atas sistem administrasi publik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sujatmiko, T. (2014). Sejarah Nasional dan Nasionalisme dalam Perspektif Sejarah Lokal. *Jurnal Seuneubok Lada*, 2(1), 106-115.
- Surbakti, R. (2010). *Reformasi administrasi negara untuk pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Syafrizal, S. (2013). *Stabilitas politik dan keberhasilan reformasi birokrasi*. Padang: Andalas University Press.
- Thoha, M. (2008). *Bureaucracy and politics in Indonesia: A historical perspective*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tjiptoherijanto, P. (2015). *Desentralisasi dan pembangunan daerah: Studi kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Wahid, A. (2020). *Digitalisasi administrasi publik: Peluang dan tantangan*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. (2001). *Partisipasi masyarakat dalam reformasi administrasi negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wirawan, W. (2016). Metode Pembelajaran Sejarah dalam Konteks Digitalisasi Informasi. *Chronologia: Journal of History Education*, 2(1), 30-35.